



Kalpataru

**JURNAL SEJARAH DAN
PEMBELAJARAN SEJARAH**



Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan IPS
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia
Palembang



Pengaruh Penerapan Model *Project Based Learning* Berbasis Video Vlog Dalam Proses Pembelajaran Sejarah

Farena Adela, Nur Ahyani, Dina Sri Nindiati

Identifikasi Nilai Pedagogi Pada Pahatan Monolid Desa Jarakan Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah

Alzata Putra, Sukardi, Aan Suriadi

Nilai Sejarah Makam Puyang Ulak Laut di Pecah Pinggan Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Berbasis Digital

Dewi Cahya, Sukardi, Eva Dina Chairunisa

Pola Sebaran Permukiman di Kota Kayu Agung

I Made Lingga Wardana, Sukardi, Wandiyono

Peran Adam Malik Sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB 1971

Rani Noviyanti

Pemanfaatan Foto dan Arsip Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah

Riki Andi Saputro, Muhammad Fitri

Nilai-Nilai Sejarah Puyang Muara Rambang Sebagai Sumber Pelajaran Sejarah Lokal di SMA 01 Muarakuang

Dwi Cahyati, Sukardi, Eva Dina Chairunisa

Pemikiran Abdul Mukti Ali Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah di SMA Patra Mandiri 1 Palembang

Andika Merryanto Saputra, Aan Suriadi, Ahmad Zamhari

Perjuangan Hj. Rangkayo Rasuna Said Sebagai Pejuang Politik dan Pemikir Pergerakan Pada Masa Pra Kemerdekaan

Narani Agesti, Ageng Sanjaya

Nilai Sosial Religi Tradisi Manopeng Pada Masyarakat Banyuur

Muhammad Fitri, Heri Susanto

PERAN ADAM MALIK SEBAGAI KETUA SIDANG MAJELIS UMUM PBB 1971

Rani Noviyanti

Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
Email: rasyaraninew@gmail.com

ABSTRAK

Memasuki dasawarsa 1970-an terdapat beberapa pergeseran dalam percaturan global. Banyaknya ketegangan, pada kebanyakan masyarakat global sangat berdampak pada pembangunan sumber daya manusia. Selama menjabat sebagai Ketua Majelis Umum PBB tahun 1971, Adam Malik menyadari akan pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Pada dekade 1970-an, di tengah situasi perang dingin, banyak negara-negara anggota yang tidak mampu atau masih mementingkan kondisi dalam negerinya ketimbang membayar iuran. Pada saat Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB, beliau memberikan gagasan agar semua anggota memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam sidang ke-23 Majelis umum PBB yang dibuka tanggal 24 September 1968, masalah pemulihan hak-hak penuh RRC di dalam PBB. Draft resolusi terbagi tiga golongan negara yang mensponsori dan memberikan gagasan atas permasalahan RRC dan Taiwan.

Kata Kunci: Adam Malik, Majelis Umum PBB

A. PENDAHULUAN

Adam Malik atau biasa dipanggil Si Bung oleh keluarga dan kerabatnya merupakan tokoh yang merasakan empat masa pemerintahan dari mulai pemerintahan kolonial Belanda hingga pemerintahan Orde Baru. Adam Malik memiliki berbagai jasa bari Indonesia dari zaman pergerakan nasional hingga perpolitik dalam dan luar negeri setelah kemerdekaan. Adam Malik juga merupakan tokoh berpengaruh dari daerahnya yakni Pematang Siantar, Sumatera Utara (Situmorang dan Suryagung Sudibyo, 2017:3).

Adam Malik dilahirkan di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 22 Juli 1917. Beliau dilahirkan dari pasangan Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Keluarga Adam Malik tergolong keluarga berada dan terpandang pada masa itu, sehingga Adam Malik dapat merasakan pendidikan sekolah dasar berbahasa Belanda (*Hollands Inlandsche School*). Tetapi pada perkembangan berikutnya Adam kecil memasuki jenjang Sekolah Agama Islam Parabek tanpa sepengetahuan orang tuanya (Jajak, 1990:127).

Sejak kecil Adam Malik dikenal sebagai anak yang cerdas dan cerdas, dan pada masa itu pula Adam Malik telah sadar dan gelisah dalam

melihat situasi dan kondisi yang menimpa bangsa ini. Keadaan seperti ini dilatar belakangi juga dengan keadaan kota Pematang Siantar yang telah secara alami membentuk dan mendewasakan pribadi dan watak Adam Malik. Realita yang terjadi dan dialaminya sendiri adalah dimana ada dua kepentingan yang saling berlawanan di wilayahnya, pertentangan antara pemilik modal dan lahan dengan kuli yang terlalu dieksploitasi (Malik, 2006:225 dan Situmorang dan Suryagung Sudibyo, 2017:3).

Adam Malik pada rentan tahun 1934-1935 mulai memasuki dunia perpolitikan dan memimpin Partai Indonesia (Partindo) wilayah Pematang Siantar. Keadaan seperti ini menambah semangat sosok Adam Malik dalam melakukan perjuangan untuk bangsa ini sehingga dirinya merantau ke Jakarta. Ketika di Jakarta dirinya semakin berkembang dan pandai terutama dalam hal bernegosiasi, diplomasi, serta berpolitik. Kerja kerasnya sedemikian menjadikan dirinya panutan dan dikatakan sebagai tokoh emas dalam perkembangan bangsa Indonesia.

Adam Malik muda mengawali karirnya sebagai wartawan di Jakarta, dan pada tahun 1937 dirinya termasuk ke dalam salah satu pendiri Kantor Berita Antara. Selanjutnya, pada rentan tahun 1940-1941 dirinya menjadi anggota Dewan

Pimpinan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) Jakarta hingga berakhirnya masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, Adam Malik aktif dalam gerakan pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau juga dikenal dalam melakukan gerakan bawah tanah bersama pemuda-pemuda Menteng 31 dalam mengantarkan Indonesia pada kemerdekaan (Malik, 2006:225).

Adam Malik mendapatkan akses ke dalam dunia internasional semasa dirinya menjadi wartawan di harian Jepang bernama *Domei*. Aksesnya yang mudah terhadap dunia internasional membuat dirinya yang cerdas memberikan banyak saran serta masukan kepada tokoh-tokoh bangsa dalam merencanakan taktik menuju kemerdekaan. Hal ini terbukti ketika para tokoh pemimpin negeri ini memperjuangkan kemerdekaan melalui berbagai cara, dari mulai perang menggunakan senjata hingga berdiplomasi ke berbagai penjuru dunia (Situmorang dan Suryagung Sudiby, 2017:3).

Semasa awal kemerdekaan tepatnya pada tahun 1945-1947, Adam Malik terpilih menjadi ketua sekaligus anggota Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Badan ini bertugas dalam upaya mempersiapkan susunan pemerintahan Indonesia kedepannya. Selama periode ini pula, Adam Malik mendirikan Partai Rakyat dan Partai Murba. Sukses seperti ini berhasil mengantarkan Adam Malik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) (Situmorang dan Suryagung Sudiby, 2017:25).

Adam Malik memiliki karir di dunia internasional yang sangat menonjol, beliau pernah menyandang berbagai jabatan. Adapun jabatan yang pernah dirinya emban seperti duta besar, ketua delegasi Indonesia dalam perundingan penyelesaian masalah Irian Barat, serta yang sangat mengesankan adalah ketika dirinya menjabat sebagai Ketua Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-26. Sampai detik ini beliau merupakan orang Indonesia pertama yang pernah menjabat sebagai ketua sidang Majelis Umum PBB. Selama itu pula dirinya memimpin persidangan PBB dan berusaha menyelesaikan berbagai permasalahan internasional seperti Indo-China, Irian Barat, dan Timur Tengah.

Selayang Pandang Majelis Umum

Majelis Umum PBB merupakan salah satu dari enam badan utama (Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Majelis umum terdiri dari semua anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Majelis Umum PBB memiliki agenda tahunan dan dipimpin oleh seorang Ketua Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil anggota (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/31/183000369> diakses pada 1 Juni 2021).

Majelis atau Sidang Umum PBB adalah badan utama PBB. Anggotanya adalah seluruh anggota di PBB yang sekarang berjumlah 193 negara. Setiap bulan September, seluruh anggota PBB bertemu di *General Assembly Hall* di Markas PBB di New York dalam mengikuti persidangan dan debat. Adapun pembicaraan yang biasanya dibahas yakni mengenai keamanan, anggaran, keanggotaan, dan diputuskan dalam Majelis Umum dengan ketentuan minimal 2/3 suara mayoritas. Setiap tahunnya, majelis umum memilih presiden dalam memimpin dengan masa jabatan satu tahun.

Majelis umum memiliki wewenang luas dalam memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan Bab IV Piagam PBB (pasal 9-14 piagam). Berdasarkan pasal 10 Piagam PBB disebutkan bahwa, "*The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as provided in article 12, may make recommendation to the Members of the United Nations...*".

Sejarah PBB

Kedudukan organisasi PBB sebagai subjek hukum internasional tidak dapat diragukan dan dipungkiri lagi. Organisasi semacam ini memiliki hak serta kewajiban yang sudah disepakati melalui konvensi-konvensi internasional yang merupakan anggaran dasarnya. Oleh sebab itu, PBB juga memiliki hak dan kewajiban seperti apa yang diterangkan di atas (Kusumaatmadja, 2003:101).

Perkembangan sejarah organisasi internasional tidak lepas dari adanya

perkembangan internasional. Pada periode hukum internasional klasik disaat negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional, perkembangan organisasi internasional belum begitu dominan dan berdampak pada hubungan antar bangsa. Awal terbentuknya badan kerjasama internasional adalah bernama Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Januari 1920 disaat terjadinya ketegangan internasional pada Perang Dunia II.

Perjanjian Versailles merupakan perjanjian awal yang mendasari didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengaturan mengenai Liga Bangsa-Bangsa terdapat di dalam *The Covenant of League of Nations* pada perjanjian Versailles yang merupakan bagian pertama dimana dikatakan bahwa:

“Part 1 of the treaty was the Covenant of the League of Nations which provided for the creation of the League of Nations, an organization intended to arbitrate international disputes and thereby avoid future wars”.

Dasar pendirian dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan usaha serta upaya kedua dalam membentuk suatu organisasi internasional yang universal dengan tujuan utamanya yakni memelihara perdamaian di bawah sistem keamanan gabungan atau kolektif. Di dalam pembukaan Piagam PBB telah juga dijelaskan mengenai cita-cita dan tujuan bersama dari negara anggota yang membentuk PBB tersebut (Pembukaan Piagam PBB).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode historis. Metode historis merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan sejarah masa lampau umat manusia. Metode historis terdiri dari empat tahapan yakni heuristik, verifikasi (kritik), interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 1986:34).

Pada tahapan heuristik peneliti mengumpulkan berbagai sumber sejarah, baik primer maupun sekunder. Heuristik diartikan sebagai pengetahuan dalam menginvestigasi sumber-sumber sejarah dan usaha-usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek yang berkaitan langsung dengan permasalahan. Data primer didapatkan dari surat kabar sezaman.

Sedangkan data sekunder didapatkan dari penelusuran pustaka (Riana, 2013:6).

Data-data yang sudah didapatkan kemudian dilakukan verifikasi atau kritik. Setidaknya terdapat dua tahapan kritik, yakni kritik internal dan eksternal. Kritik internal dilakukan dalam menguji kebenaran sumber. Lalu tahapan kritik eksternal adalah mengajukan berbagai pertanyaan seputar sumber, apakah itu dapat dipertahankan dan dibuktikan kebenarannya atau tidak (Yuliani dan Yunani Farida, 2018:7).

Tahapan berikutnya adalah interpretasi yang dilakukan dengan cermat dan teliti agar tidak terlepas dari hegemoni zaman itu. Analisis sejarah memiliki tujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta-fakta yang diperoleh dari sumber sejarah yang selanjutnya diinterpretasikan (Adurrahman, 1999:64).

Pada tahapan akhir adalah historiografi. Tahapan ini merupakan penulisan atas semua rangkaian metode yang telah dilakukan sebelumnya sehingga menghasilkan karya sejarah. Historiografi juga dapat diartikan sebagai cara penulisan, pemaparan, dan pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan (Irwanto dan Sair, 2014:151).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Negara Anggota PBB

Selepas terjadinya Perang Dunia II ditahun 1945, maka era baru dalam perhelatan dunia terjadi. Peristiwa pasca Perang Dunia II lazimnya kita kenal sebagai era perang dingin. Era ini dipenuhi dengan perselisihan dalam bidang ideologi, teknologi, dan ekonomi. Imbas yang dihasilkan dari itu semua tentu pembangunan pada kesejahteraan masyarakat global (U.S. Department of State, 2005:229-255).

Memasuki dasawarsa 1970-an setidaknya terjadi tiga pergeseran dalam percaturan global. Pertama, dalam bidang politik, pada dekade ini Amerika Serikat tidak lagi memandang RRC sebagai musuh dan dipandang sebagai alat dalam menghancurkan hegemoni Uni Soviet. Selanjutnya yang kedua, dalam bidang ekonomi, telah terdapat kerjasama yang signifikan antara kelompok kapitalisme dan komunisme yang masing-masing diwakili Amerika Serikat dan Uni

Soviet. Dan yang terakhir, dalam bidang militer Amerika Serikat dan Uni Soviet keduanya saling menghindari dan membuat kesepakatan mengenai apa yang dikhawatirkan mengenai perang nuklir (Shanor, 1989:173).

Banyaknya ketegangan seperti ini, pada kebanyakan masyarakat global tentu akan sangat berdampak pada pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia akan berjalan dengan baik apabila terciptanya kedamaian dan kesejahteraan dunia. Pada dasawarsa 1970-an pula kita dapat melihat peralihan dunia, dari ketegangan yang berlandaskan pada kekuatan militer dan hegemoni ideologi, menjadi kepada adu kekuatan ekonomi.

Sebelum dekade 1960-an, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sumber daya manusia hanya didefinisikan sebagai kemampuan nasional dalam mempertahankan serta menaikkan laju pertumbuhan GNP. Kesalahan konsep dan gagasan di masa itu merubah afiliasi dunia secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi juga diimbangi dengan pembangunan kualitas hidup masyarakatnya (Safri, 2016:5-6).

Konsep pembangunan dan pengembangan merujuk pada suatu kegiatan yang menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, di mana ini berlangsung secara terus-menerus. Kegiatan seperti ini juga diartikan sebagai usaha memperbaiki tatanan dan penyempurnaan. Pembangunan sumber daya manusia yang baik adalah ketika dilakukannya beragam pelatihan, pendidikan, serta evaluasi (Soetopo dan Wasty Soemantio, 1982:45).

Sejatinya pembangunan sumber daya manusia secara global telah disadari PBB sejak dekade tahun 1960-an. Ketua Majelis Umum PBB pada tanggal 25 September 1961 mendeklarasikan *United Nations Decade of Development*. Sayangnya hal ini lagi-lagi tidak berjalan dengan mulus, apa yang tertulis hanya ditulis pada kertas semata dan tidak diimplementasikan di dunia nyata.

Selama menjabat sebagai Ketua Majelis Umum PBB tahun 1971, Adam Malik telah menyadari akan pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia sendiri diarahkan dalam

menciptakan tenaga-tenaga terdidik dan berkualitas global. Beliau menyadari terdapat jarak yang signifikan antara pembangunan manusia di Amerika dan Eropa dengan kebanyakan negara Asia, Afrika, dan Amerika Selatan.

Baginya, usaha yang dapat mempercepat pembangunan manusia adalah dengan adanya lokakarya dan seminar. Ia menyatakan hal seperti ini bukanlah barang baru di Indonesia dan dunia global, namun cukup efektif dalam memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengetahuan ke tengah-tengah masyarakat. Kegiatan pendidikan seperti seminar mungkin hanya sebatas pengembangan pemikiran dan gagasan, bahkan dirinya mengibaratkan agar setiap pemikiran dan pengembangan manusia melalui pendekatan seperti kita membuat penelitian. Pendekatan pemikiran manusia secara umum dapat digolongkan seperti Bab I yakni pendahuluan, Bab II yakni pembatasan masalah, Bab III yakni identifikasi masalah, Bab IV yakni pemecahan masalah, dan terakhir Bab V yakni kesimpulan dan saran-saran.

Namun apa yang menjadi gagasan PBB sejak dekade 1960-an serta apa yang dicanangkan oleh Adam Malik di tahun 1971 akan terhambat oleh apa yang disebut sebagai jurang pembatas. Jurang pembatas seperti ini memisahkan dunia ke dalam dua bagian, yakni miskin dan kaya. Keterbatasan negara miskin tentu akan sangat berdampak pada pembangunan sumber daya manusianya juga.

Penyelesaian Masalah Keuangan PBB

Pada dekade 1960-an hingga dekade 1970-an tentu telah kita sadari bahwa dunia mengalami berbagai gejolak. Apa yang umum terjadi yakni ketidakstabilan politik, ekonomi, dan militer antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keadaan seperti ini juga sangat berdampak pada keuangan badan internasional PBB. Pendanaan yang dimiliki PBB adalah iuran yang diberikan oleh anggota PBB secara rutin.

Narasi akan kebangkrutan PBB pun sebetulnya sudah sejak lama terdengar. Organisasi internasional yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia ini masih sangat bergantung pada iuran negara anggotanya. Pada dekade 1970-an, di tengah situasi perang dingin,

banyak negara-negara anggota yang tidak mampu atau masih mementingkan kondisi dalam negerinya. Hal ini menyebabkan krisis keuangan dan pendanaan di dalam PBB.

Dalam situs resmi PBB di tahun 2019, kontribusi iuran wajib anggota mencapai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 39 triliun rupiah. Negara penyumbang iuran terbesar tak lain adalah *The Big Five*. Masing-masing negara *superpower* tersebut menyumbang antara lain Amerika Serikat dengan jumlah 22 persen iuran, China menopang 12 persen iuran, Inggris menyumbang 4,5 persen iuran, disusul oleh Prancis dengan nilai 4,4 persen iuran keseluruhan PBB, dan terakhir adalah Rusia dengan 2,4 persen (<https://www.era.id/afair/24653> diakses pada 2 Juni 2021).

Alokasi dari iuran rutin ini adalah untuk program-program seperti pangan, perdamaian, pendidikan, dan kebudayaan. Program-program seperti ini merupakan kegiatan rutin tahunan PBB dalam upaya menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Program ini pula yang setidaknya sangat memberatkan PBB didekade tahun 1970-an, di mana pada saat itu masih banyak negara-negara yang tengah berperang, krisis, dan kurang akses terhadap dunia luar.

Adam Malik sebagai ketua sidang Majelis Umum PBB tahun 1971 telah sadar akan kelemahan PBB dalam hal pendanaan. Beliau memandang bahwa hal ini seharusnya telah menyebabkan PBB diambang kebangkrutan sejak lama. Pada saat Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB, beliau memberikan gagasan agar semua anggota memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini. Persoalan keuangan dan iuran baginya adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh tiap-tiap anggota yang tergabung di dalam PBB. Kesadaran negara anggota juga diharapkan mampu melunasi hutang-hutang organisasi terbesar di dunia tersebut dan kembali dapat menjalankan hidupnya (Malik, 2005:191).

Hingga akhir masa jabatan Adam Malik sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB permasalahan seperti ini tak dapat terselesaikan. Memang sejatinya perlu ada kesadaran dalam diri setiap anggota akan pentingnya peran dan bantuan mereka dalam pengembangan dan

keberlangsungan program dan kehidupan PBB itu sendiri. Pada kenyataannya bahkan negara-negara yang senantiasa acuh pada aturan ini adalah negara yang dalam segi ekonomi dapat dikatakan sejahtera, contohnya adalah Israel, Arab Saudi, Iran, Meksiko, Brazil, Uruguay, serta Korea Selatan (<https://cnbcindonesia.com/market/20191013132839> diakses pada 2 Juni 2021).

Masuknya RRC dalam Keanggotaan PBB

Dalam sidang ke-23 Majelis Umum PBB yang dibuka tanggal 24 September 1968, masalah "Pemulihan hak-hak penuh RRC di dalam PBB (*Restoration of the lawful rights of the people's Republic of China in the United Nations*)" telah dimasukkan di dalam agenda atas usul dari 11 negara yaitu Albania, Aldjazair, Kamboja, Kongo Barzaville, Kuba, Guinea, Mali, Mauritania, Rumania, Suriah dan Yaman Selatan (Koran Kompas, 1 September 1971).

Memorandum di atas dijadikan alasan penting masuknya RRC di dalam PBB bagi masa depan dari organisasi tersebut. Setelah keberhasilan Mao Tse Tung dan rekan-rekannya dalam mengusir Chiang Kai Shek dari daratan Cina sehingga memproklamirkan dirinya sebagai Republik Rakyat Cina (RRC), mereka berkeinginan untuk menjadi anggota PBB (Koran Kompas, 22 September 1971). Alasan lain mengenai pentingnya keanggotaan RRC di PBB adalah RRC berhasil melakukan pembangunan ekonomi dan sosial melalui komunis dan revolusi kebudayaan sehingga menjadi negara ekonomi tangguh dan negara nuklir yang harus diperhitungkan oleh Amerika Serikat maupun Sekutu RRC yaitu Uni Soviet. Setiap peristiwa yang terjadi di dunia sekarang ini harus diakui ada pengaruh dari atau terlibatnya RRC di dalamnya. Melihat kedudukan RRC yang semakin kuat dalam persoalan-persoalan dunia maka negara-negara super power tidak bisa lagi meninggalkan RRC dalam percaturan dunia. Menolak duduknya RRC adalah diskriminatif, tidak saja merupakan pembangkangan yang gawat terhadap keadilan, melainkan juga pengingkaran terhadap prinsip yang paling esensial dari PBB yakni sifat mencakup seluruh dunia dan penolakan keanggotaan RRC tidak bisa lain daripada motif politik semata-mata yang berlawanan arah

dengan realita (Koran Kompas, 1 September 1971).

Pernyataan di atas adalah pokok-pokok memorandum negara-negara pengusul. Sidang Majelis Umum PBB membahas masalah itu dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 19 November 1968. Ada tiga macam draft resolusi yang tentunya berbeda satu sama lain. Draft resolusi pertama disponsori oleh 14 negara yaitu Australia, Bolivia, Brazilia, Colombia, Gabon, Italia, Jepang, Malagasi, Selandia Baru, Nikaragua, Filipina, Thailand, Togo dan Amerika Serikat. Usul mereka adalah pergantian keanggotaan dari Taiwan menjadi RRC merupakan masalah penting yang memerlukan persetujuan dari 2/3 anggota yang hadir dan memberikan suaranya sesuai dengan pasal 18 piagam PBB dan syarat ini cukup berat bagi RRC. Draft resolusi yang kedua adalah mendukung masuknya RRC dan bersamaan itu menuntut keluarnya Chiang Kai Shek dari PBB dan semua organisasi yang berhubungan dengan itu. Ini disepakati oleh 16 negara yaitu, Albania, Aldjazair, Kamboja, Kongo Brazaville, KUba, Guinea, Mali Mauritania, Pakistan, Rumania, Yaman Selatan, Sudan Suriah, Tanzania, Zambia dan Yaman. Draft resolusi ketiga disponsori oleh 5 negara yaitu, Belgia, Chili, Iceland dan Luxemburg. Usul yang dimaksud adalah pembentukan suatu panitia yang ditunjuk oleh majelis umum dengan tugas melakukan penjajakan seluruh aspek, yang hasilnya disusun dalam sebuah rekomendasi untuk dibahas dalam sidang ke-24 Majelis Umum.

Sidang Majelis Umum PBB tanggal 19 November 1968 melakukan pemungutan suara dari ketiga draft yang diajukan. Hasil dari pemungutan suara tersebut adalah dipilihnya draft resolusi yang pertama yang disponsori oleh 14 negara. Hasilnya yaitu perbandingan suara 73 lawan 43 dengan abstain 5 suara. Draft resolusi 14 negara itu menjadi resolusi 2389 (XXIII).

D. SIMPULAN

Memasuki dasawarsa 1970-an terjadi tiga pergeseran dalam percaturan global. Pertama, dalam bidang politik, pada dekade ini Amerika Serikat tidak lagi memandang RRC sebagai musuh. Selanjutnya yang kedua, dalam bidang ekonomi, telah terdapat kerjasama yang

signifikan antara kelompok kapitalisme dan komunisme. Terakhir, dalam bidang militer Amerika Serikat dan Uni Soviet keduanya saling menghindari dan membuat kesepakatan mengenai perang nuklir.

Banyaknya ketegangan seperti ini, pada kebanyakan masyarakat global tentu akan sangat berdampak pada pembangunan sumber daya manusia. Sebelum dekade 1960-an, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sumber daya manusia hanya didefinisikan sebagai kemampuan nasional dalam mempertahankan serta menaikkan laju pertumbuhan GNP. Konsep pembangunan dan pengembangan merujuk pada suatu kegiatan yang menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, di mana ini berlangsung secara terus-menerus.

Selama menjabat sebagai Ketua Majelis Umum PBB tahun 1971, Adam Malik telah menyadari akan pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Usaha yang dapat mempercepat pembangunan manusia adalah dengan adanya lokakarya dan seminar. Gagasan PBB sejak dekade 1960-an serta apa yang dicanangkan oleh Adam Malik di tahun 1971 akan terhambat oleh jurang pembatas. Jurang pembatas seperti ini memisahkan dunia ke dalam dua bagian, yakni miskin dan kaya.

Pada dekade 1960-an hingga dekade 1970-an dunia mengalami berbagai gejolak. Pada dekade 1970-an, di tengah situasi perang dingin, banyak negara-negara anggota yang tidak mampu atau masih mementingkan kondisi dalam negerinya ketimbang membayar iuran PBB. Alokasi dari iuran rutin ini adalah untuk program-program seperti pangan, perdamaian, pendidikan, dan kebudayaan.

Pada saat Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB, beliau memberikan gagasan agar semua anggota memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini. Bahkan pada saat itu Indonesia juga telah berusaha menyumbangkan dana bagi kemajuan PBB. Hingga akhir masa jabatan Adam Malik sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB permasalahan seperti ini tak dapat terselesaikan.

Dalam sidang ke-23 Majelis Umum PBB yang dibuka tanggal 24 September 1968,

masalah "Pemulihan hak-hak penuh RRC di dalam PBB (*Restoration of the lawful rights of the people's Republic of China in the United Nations*)" telah dimasukkan di dalam agenda. Memorandum ini dijadikan alasan penting masuknya RRC di dalam PBB bagi masa depan dari organisasi tersebut. Alasan lain mengenai pentingnya keanggotaan RRC di PBB adalah RRC berhasil melakukan pembangunan ekonomi dan sosial melalui komunis dan revolusi kebudayaan sehingga menjadi negara ekonomi tangguh dan negara nuklir yang harus diperhitungkan oleh Amerika Serikat maupun sekutu RRC yaitu Uni Soviet.

Draft resolusi pertama disponsori oleh 14 negara usul mereka adalah pergantian keanggotaan dari Taiwan menjadi RRC merupakan masalah penting yang memerlukan persetujuan dari 2/3 anggota yang hadir dan memberikan suaranya sesuai dengan pasal 18 piagam PBB dan syarat ini cukup berat bagi RRC. Draft resolusi yang kedua adalah mendukung masuknya RRC dan bersamaan itu menuntut keluarnya Chiang Kai Shek dari PBB dan semua organisasi yang berhubungan dengan itu. Ini disepakati oleh 16 negara. Draft resolusi ketiga disponsori oleh 5 negara usul yang dimaksud adalah pembentukan suatu panitia yang ditunjuk oleh majelis umum dengan tugas melakukan peninjauan seluruh aspek, yang hasilnya disusun dalam sebuah rekomendasi untuk dibahas dalam sidang ke-24 Majelis Umum. Sidang Majelis Umum PBB tanggal 19 November 1968 memberikan hasil dari pemungutan suara tersebut adalah dipilihnya draft resolusi yang pertama yang disponsori oleh 14 negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Dudung. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bureau of International Information Program. (2005). *Outline of US History*. US Department of State.
- Gottschalk, Louis. (1986). *Understanding History: A Primer of Historical Method*. Diterjemahkan oleh Notosusanto,

Nugroho. (1986). Jakarta: Yayasan Penerbit UI.

Irwanto, Dedi dan Alian Sair. (2014). *Metodologi dan Historiografi Sejarah: Cara Menulis Cepat*. Yogyakarta: Eja Publisher.

Jajak, MD. (1990). *Biografi Presiden dan Wakil Presiden RI 1945-Sekarang*. Jakarta: PT. Asri Media Pustaka.

Kusumaatmadja, M. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Putra Abardin.

Malik, Adam. (2005). *Mengabdi Republik: Jilid 1 Adam dari Andalas*. Jakarta: Tim Penerbit.

_____. (2006). *Mengabdi Republik: Jilid 2 Adam dari Andalas*. Jakarta: Tim Penerbit.

Situmorang, N dan Suryagung Sudibyo. (2017). *Adam Malik Menembus Empat Zaman, Memperingati 100 Tahun Adam Malik*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Soetopo, H dan Wasty Soemanto. (1982). *Kepemimpinan Dan Supervisi*. Jakarta: Bina Aksara.

Jurnal

Riana, Riska. (2013). *Perkembangan Perminyakan di Sumatera Selatan Tahun 1945-1950*. Criksetra. 2(2): 1-12.

Safri, Hendra. (2016). *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan*. *Jurnal of Islamic Education Management*. 1(1): 102-112.

Shanor, Donald R. (1989). *The Soviet Triangle: Russia Relations with China and The West in 1980s*. *Asian Survey*. XXVII: 9.

Yuliani, Rita dan Yunani, Farida. (2018). *Perkembangan Radio Republik Indonesia (RRI) Cabang Palembang Tahun 2000-2015*. *Jurnal Criksetra*. 7(1): 1-15.

Surat Kabar Sezaman

Koran Kompas, 1 September 1971

Internet

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/31/183000369> diakses pada 1 Juni 2021

<https://www.era.id/afair/24653> diakses pada 2 Juni 2021

<https://cnbcindonesia.com/market/20191013132839> diakses pada 2 Juni 2021

KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL KALPATARU

1. Naskah berbahasa Indonesia yang disempurnakan bertemakan kesejarah yang meliputi hasil penelitian sejarah, pengajaran sejarah dan penelitian kebudayaan.
2. Naskah harus asli dan belum pernah dimuat dalam media lain. Naskah dapat berupa hasil penelitian/artikel kajian konseptual yang ditulis oleh perorangan dan atau kelompok.
3. Naskah ditulis dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan penulisan artikel ilmiah menggunakan bahasa Indonesia yang baku, berupa ketikan, beserta soft file dalam CD-RW atau dengan mengirimkan email pada redaksi jurnal Kalpataru dengan alamat jurnalkalpatarusejarah@gmail.com, spasi tunggal, jenis huruf arial narrow ukuran 12, dengan panjang naskah antara 8-15 halaman pada kertas A4.
4. Artikel hasil penelitian memuat:
 - JUDUL** : **XXX (HURUF KAPITAL)**
 - Nama Penulis** : **(disertai jabatan, institusi, dan email)**
 - Abstrak** : (Bahasa Indonesia yang memuat 100-200 kata diikuti kata kunci, dengan jenis huruf arial narrow dan ukuran huruf 11 serta dicetak miring).
 - A. PENDAHULUAN** : (memuat latar belakang masalah, tinjauan pustaka secara ringkas, masalah penelitian, dan tujuan penelitian).
 - B. METODE PENELITIAN**
 - C. HASIL DAN PEMBAHASAN**
 - D. SIMPULAN** : (berisi simpulan).
 - DAFTAR PUSTAKA** : (berisi pustaka yang dirujuk dalam uraian naskah).
5. Artikel Kajian Konseptual memuat:
 - JUDUL** : **XXX (HURUF KAPITAL)**
 - Nama Penulis** : **(disertai jabatan, institusi, dan email)**
 - Abstrak** : (Bahasa Indonesia yang memuat 100-200 kata diikuti kata kunci, dengan jenis huruf arial narrow dan ukuran huruf 11 serta dicetak miring).
 - PENDAHULUAN** : (memuat latar belakang masalah, tinjauan pustaka secara ringkas, masalah penelitian, dan tujuan penelitian).
 - Sub Judul** : Sesuai dengan kebutuhan (tanpa numbering).
 - Simpulan** : (berisi simpulan dan saran).
 - DAFTAR PUSTAKA**
6. Referensi sumber dalam teks artikel ditulis dengan menggunakan side note, contoh (Jalaludin, 1991:79); sementara penulisan daftar pustaka disusun dengan ketentuan. Nama pengarang. Tahun terbit. Judul (dicetak miring). Kota terbit: Nama Penerbit. Contoh: Koentjaraningrat. 2010. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Daftar pustaka hanya memuat pustaka/sumber yang dirujuk dalam uraian dan disusun menurut abjad tanpa nomor urut.
7. Naskah yang dimuat akan disunting kembali oleh redaksi tanpa mengubah isinya.
8. Naskah yang ditolak (tidak bisa dimuat) akan dikirim kembali ke penulis dengan pemberitahuan tertulis dari redaksi atau melalui email.
9. Penulis yang naskahnya dimuat akan mendapat 1 (satu) majalah nomor yang bersangkutan.
10. Kontak person: Muhamad Idris (081271498618); Eva Dina Chairunisa (082281267851); Jeki Sepriady (085269261780).